



Katalog : 720305.13

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

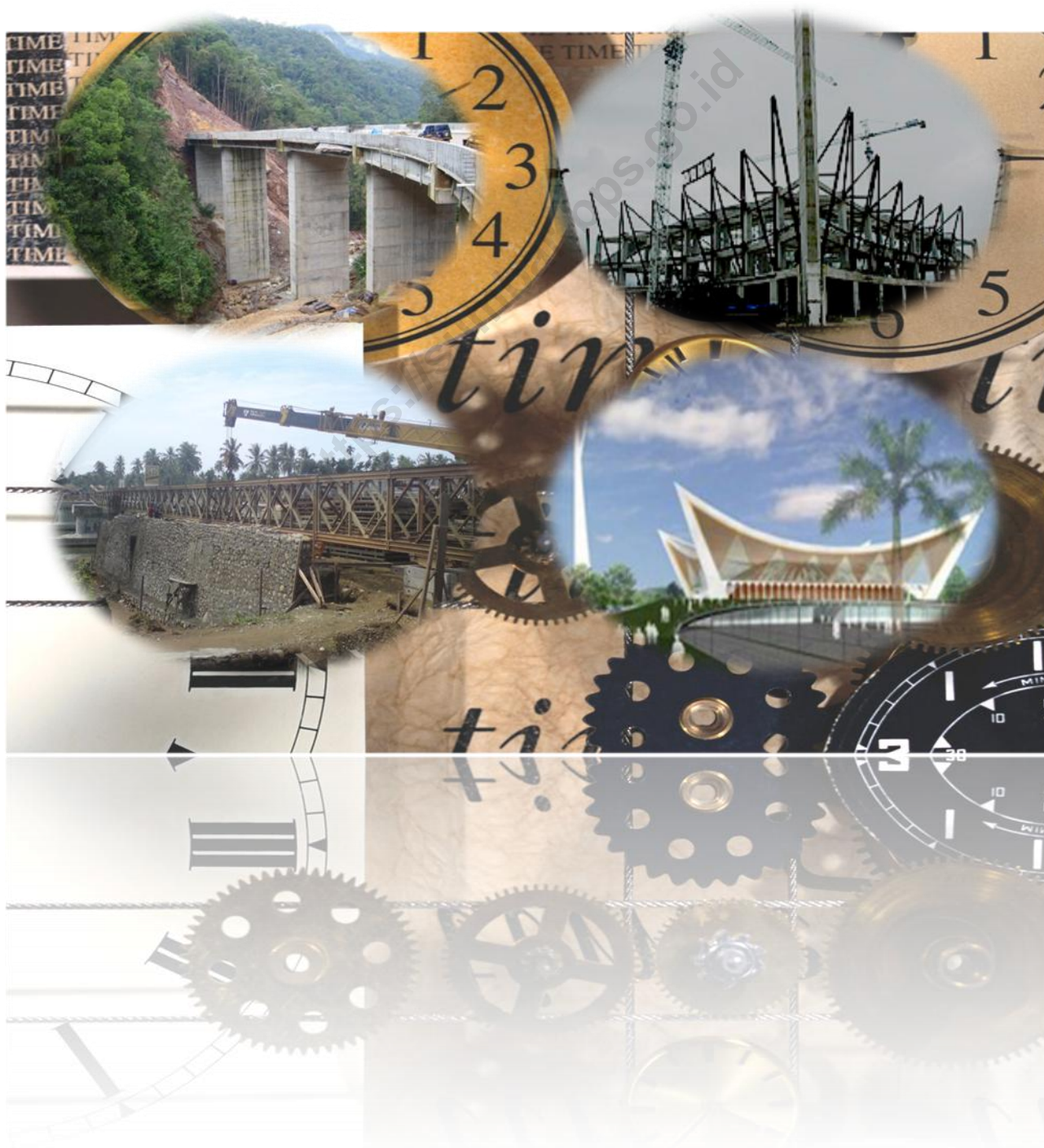
SUMATERA BARAT 2010



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

SUMATERA BARAT 2010



KATA PENGANTAR

Publikasi **Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat 2010** ini merupakan kelanjutan dari publikasi yang sama pada tahun-tahun yang lalu. Tahun ini diterbitkan kembali dengan mengikuti format dari laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan daerah.

Data dalam publikasi ini disajikan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dirinci menurut sumber-sumber penerimaan dan pendistribusian pengeluaran-pengeluarannya. Disamping itu, publikasi ini juga menyajikan cakupan data, metode pengumpulan data, definisi dan konsep, serta ulasan singkat mengenai keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat membantu pemakai data dalam memahami data-data yang disajikan.

Kami menyadari bahwa publikasi ini belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pemakai data secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan dan pengembangannya pada masa yang akan datang. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi para konsumen data.

Padang, Maret 2012
Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,

Ir. Muchsin Ayub

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
PENJELASAN UMUM	1
A. PENDAHULUAN	1
B. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGUMPULAN DATA	1
C. KONSEP DEFINISI	2
D. ULASAN SINGKAT	7
Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Barat	7
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	12
Tabel 1.1.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Se-Sumatera Barat Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	13
Tabel 1.1.1.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	14
Tabel 1.1.2.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	15
Tabel 1.1.3.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	16
Tabel 1.1.4.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	17
Tabel 1.1.5.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	18
Tabel 1.1.6.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	19
Tabel 1.1.7.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	20
Tabel 1.1.8.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	21
Tabel 1.1.9.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	22
Tabel 1.1.10.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	23
Tabel 1.1.11.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	24

Tabel 1.1.12.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	25
Tabel 1.1.13.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Padang Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	26
Tabel 1.1.14.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Solok Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	27
Tabel 1.1.15.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	28
Tabel 1.1.16.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	29
Tabel 1.1.17.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	30
Tabel 1.1.18.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	31
Tabel 1.1.19.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Pariaman Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	32
Tabel 2.	Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	33
Tabel 2.1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten/Kota, 2010	34
Tabel 2.1.1.	Realisasi Pajak Daerah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	35
Tabel 2.1.2.	Realisasi Retribusi Daerah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	36
Tabel 2.1.3.	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	37
Tabel 2.1.4.	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	38
Tabel 2.2.	Realisasi Dana Perimbangan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	39

Tabel 2.2.1.	Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	40
Tabel 2.2.2.	Realisasi Dana Alokasi Umum Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	41
Tabel 2.2.3.	Realisasi Dana Alokasi Khusus Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	42
Tabel 2.3.	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2010	43
Tabel 2.4.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2010	44
Tabel 3.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2010	45
Tabel 3.1.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Se-Sumatera Barat Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2010	46
Tabel 3.1.1.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2010	47
Tabel 3.1.2	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2010	48
Tabel 3.1.3	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2010	49
Tabel 3.1.4	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2010	50
Tabel 3.1.5	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2010	51
Tabel 3.1.6	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2010	52
Tabel 3.1.7	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2010	53
Tabel 3.1.8	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2010	54

Tabel 3.1.9	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2010	55
Tabel 3.1.10	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2010	56
Tabel 3.1.11.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Menurut Komponen Penerimaan Tahun 2010	57
Tabel 3.1.12.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2010	58
Tabel 3.1.13.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Padang Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2010	59
Tabel 3.1.14.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Solok Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2010	60
Tabel 3.1.15.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2010	61
Tabel 3.1.16.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2010	62
Tabel 3.1.17.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2010	63
Tabel 3.1.18.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2010	64
Tabel 3.1.19.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Pariaman Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2010	65
Tabel 4.	Realisasi Belanja Daerah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	66
Tabel 4.1.	Realisasi Belanja Tidak Langsung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	67
Tabel 4.1.1.	Realisasi Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2010	68
Tabel 4.1.2.	Realisasi Belanja Bunga Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	69
Tabel 4.1.3.	Realisasi Belanja Subsidi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	70
Tabel 4.1.4.	Realisasi Belanja Hibah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	71

Tabel 4.1.5.	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	72
Tabel 4.1.6.	Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	73
Tabel 4.1.7.	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	74
Tabel 4.1.8.	Realisasi Belanja Tidak Terduga Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	75
Tabel 4.2.	Realisasi Belanja Langsung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	76
Tabel 4.2.1.	Realisasi Belanja Langsung Belanja Pegawai Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	77
Tabel 4.2.2.	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	78
Tabel 4.2.3.	Realisasi Belanja Modal Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	79
Tabel 4.3.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	80

I. PENJELASAN UMUM

A. Pendahuluan

Publikasi “Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat 2010” ini menyajikan data realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Data publikasi ini merupakan hasil olahan data dari kegiatan pengumpulan data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan salah satu kegiatan rutin tahunan Bidang Statistik Distribusi.

Beberapa indikator dan informasi penting yang dapat diperoleh, antara lain :

1. Memberikan gambaran tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
3. Memberikan informasi bagi Pemerintah Pusat dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah.

Dengan demikian, publikasi ini dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai potensi dan kemampuan dari masing-masing daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing.

B. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data yang disajikan dalam publikasi ini adalah data penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2010. Sisi penerimaan terdiri dari pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah) dan pembiayaan (sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu ditambah lain-lain penerimaan). Sisi pengeluaran terdiri dari belanja langsung (belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga) dan pembiayaan (sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan ditambah lain-lain pengeluaran).

Data ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi dengan menggunakan daftar K-1 dan untuk kabupaten/kota menggunakan daftar K-2. Sumber data diperoleh

dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kantor Gubernur di Provinsi, sementara di kabupaten/kota data diperoleh dari kantor bupati/walikota bagian keuangan. Data ini dikumpulkan secara sensus tiap kabupaten/kota.

C. Konsep Definisi

C.1. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah adalah realisasi/penghitungan APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota pada setiap tahun anggaran.

C.2. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

C.3. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Tak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

Belanja Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan

daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil ini terdiri dari:

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan yang bersifat umum, peruntukan, dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Bantuan keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya.

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Belanja Pegawai adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja pegawai terdiri dari honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, belanja beasiswa, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS.

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai, dan lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembentukan asset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi,

alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik, dan telepon,

C.4. Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenan adalah pos yang digunakan untuk mengetahui pembiayaan netto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

D. ULASAN SINGKAT

D.1. Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun anggaran 2010, realisasi pendapatan daerah pemerintah tingkat Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 1.920,971 milyar rupiah atau turun 5,19 persen dari tahun sebelumnya. Dana tersebut sebesar 785,575 milyar rupiah berasal dari dana perimbangan, 1.006,821 milyar rupiah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dan berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 128,575 milyar rupiah (Tabel 1).

Penurunan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2010 diakibatkan adanya penurunan yang signifikan pada sumber lain-lain pendapatan yang sah yang menurun hingga 74 persen dibanding tahun anggaran 2009. Akan tetapi, pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah pada tahun ini tercatat relatif lebih tinggi dari dana perimbangan, dimana sekitar 52,41 persen pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan 40,89 persen berasal dari dana perimbangan. Kondisi ini menunjukkan adanya pemanfaatan potensi daerah yang lebih optimal.

Sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah pemerintah Provinsi Sumatera Barat berasal dari pajak daerah 768,724 milyar rupiah (76,35 persen) dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 163,017 milyar rupiah. Sementara sisanya berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 46,814 milyar rupiah (4,65 persen) dan retribusi daerah sebesar 28,265 milyar rupiah (2,81 persen).

Sementara itu, kontribusi terbesar pada dana perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 662,403 milyar rupiah atau sekitar 84,32 persen, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya memberikan kontribusi sebesar 14,415 milyar rupiah (1,84 persen).

Jika dilihat dari sisi belanja daerah pemerintah tingkat Provinsi Sumatera Barat, realisasi pada tahun 2010 tercatat sebesar 2.239,753 milyar rupiah, meningkat 35,14 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada hampir

seluruh jenis belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Realisasi yang dikeluarkan untuk belanja tidak langsung sebesar 1.031,744 milyar rupiah dan belanja langsung sebesar 1.208,010 milyar rupiah. Realisasi belanja tidak langsung sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, yaitu 452,839 milyar rupiah atau sekitar 43,89 persen, dengan nilai 327,188 milyar rupiah digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa terealisasi sebesar 463,591 milyar rupiah.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

Alokasi Anggaran	Nilai (000 000 Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan	1 920 971,383	100,00
1. Pendapatan Asli Daerah	1 006 820,947	52,41
2. Dana Perimbangan	785 574,959	40,90
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	128 575,476	6,69
B. Belanja Daerah	2 239 753,491	100,00
1. Belanja Tidak Langsung	1 031 743,731	100,00
1.1. Belanja Pegawai	452 838,728	43,89
2.2. Belanja Bunga, Subsidi, Hibah	56 700,222	5,50
3.3. Belanja Bantuan Sosial	55 567,604	5,39
4.4. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	463 591,110	44,93
5.5. Belanja Tidak Terduga	3 046,069	0,30
2. Belanja Langsung	1 208 009,760	53,93
1.1. Belanja Pegawai	79 094,896	6,55
2.2. Belanja Barang dan Jasa	545 847,300	45,19
3.3. Belanja Modal	583 067,564	48,27

Alokasi belanja langsung didominasi untuk kebutuhan belanja modal, yaitu sebesar 583,068 milyar rupiah (48,27 persen). Pengeluaran terbesar kedua digunakan untuk belanja barang dan jasa, yaitu sebesar 545,847 milyar rupiah atau sekitar 45,19 persen. Sedangkan pengeluaran untuk biaya belanja pegawai hanya sebesar 79,095 milyar rupiah atau sebesar 6,55 persen.

D.2. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat total realisasi pendapatan di seluruh daerah tingkat kabupaten/kota Se-Sumatera Barat tercatat sebesar 9.182,820 milyar rupiah. Sumber utama pendapatan daerah antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari ketiga sumber tersebut terlihat bahwa penerimaan dari dana perimbangan merupakan penerimaan yang paling besar, yaitu 7.569,180 milyar rupiah (82,43 persen).

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2010

Jenis Pendapatan	Nilai (000 000 Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1. Pendapatan Asli Daerah	534 677,675	5,82
a. Pajak Daerah	148 218,033	27,72
b. Retribusi daerah	132 585,048	24,80
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yg Dipisahkan	73 356,062	13,72
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	180 518,533	33,76
2. Dana Perimbangan	7 569 179,841	82,43
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1 078 962,752	11,75
Jumlah	9 182 820,269	100,00

Sebaliknya, penerimaan daerah dari PAD masih sangat rendah, yaitu 534,678 milyar rupiah (5,82 persen). Penerimaan PAD seharusnya dapat menjadi sumber pendapatan utama di daerah tersebut, karena pendapatan ini digali dari potensi daerah dan daerah mempunyai kewenangan penuh dalam memanfaatkan PAD ini sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Kondisi ini mencerminkan tingkat kemandirian daerah yang masih sangat rendah.

Sementara itu pada sisi pengeluaran, sebagian besar belanja pemerintah daerah kabupaten/kota lebih banyak terserap untuk kebutuhan belanja tidak langsung

dibandingkan untuk kebutuhan belanja langsung yang bersifat rutin. Pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan dana sebesar 9.432,392 milyar rupiah untuk belanja daerah. Dimana sebesar 3.193,736 milyar rupiah digunakan untuk belanja langsung dengan alokasi terbesar dikeluarkan untuk belanja modal, yaitu 1.453,461 milyar rupiah (45,51 persen) dan belanja barang dan jasa sebesar 1.341,980 milyar rupiah (42,02 persen). Sedangkan untuk belanja pegawai adalah sebesar 398,295 milyar rupiah (12,47 persen), sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2010

Jenis Pengeluaran	Nilai (000 000 Rp)	Persentase
(1)	(2)	(3)
1. Belanja Tidak Langsung	6 238 656,130	66,14
a. Belanja Pegawai	5 353 049,067	85,80
b. Belanja Bunga, Subsidi, Hibah	315 958,202	5,06
c. Belanja Bantuan Sosial	263 267,993	4,22
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	261 957,600	4,20
e. Belanja Tidak Terduga	44 423,268	0,71
2. Belanja Langsung	3 193 735,853	33,86
a. Belanja Pegawai	398 294,646	12,47
b. Belanja Barang dan Jasa	1 341 980,417	42,02
c. Belanja Modal	1 453 460,790	45,51
Jumlah	9 432 391,983	100,00

Bila dilihat pada masing-masing kabupaten/kota, Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat, mempunyai realisasi pendapatan dan belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yaitu masing-masing sebesar 1.040,020 milyar rupiah dan 1.100,368 milyar rupiah. Realisasi pendapatan paling besar berasal dari dana perimbangan, yaitu sebesar 866,143 milyar rupiah atau 83,28 persen, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum sebesar 632,117 milyar rupiah (72,98 persen), Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 43,516 milyar rupiah (5,02 persen), dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 190,510 milyar rupiah (22 persen).

Sedangkan pendapatan asli daerah Kota Padang hanya sebesar 116,691 milyar rupiah atau 11,22 persen, yang berasal dari pajak daerah sebesar 77,639 milyar rupiah dan retribusi daerah sebesar 21,986 milyar rupiah, sedangkan sisanya berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari sisi pengeluaran, sebagian besar anggaran dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, yaitu sebesar 803,197 milyar rupiah (72,99 persen), sementara untuk belanja langsung sebesar 297,171 milyar rupiah (27,01 persen).

Bila dilihat antar kabupaten di Sumatera Barat, realisasi pendapatan daerah terbesar adalah di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 731,534 milyar rupiah. Sumber pendapatan terbesar masih berasal dari dana perimbangan sebesar 544,513 milyar rupiah (74,43 persen), terutama dari dana alokasi umum yang tercatat sebesar 454,097 milyar rupiah. Sedangkan pendapatan asli daerah hanya tercatat sebesar 17,596 milyar rupiah (2,41 persen). Sementara dari sisi pengeluaran Kabupaten Pesisir Selatan telah mengeluarkan dana sebesar 725,141 milyar rupiah, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 499,150 milyar rupiah (68,83 persen) dan belanja langsung sebesar 225,991 milyar rupiah (31,17 persen).

Selanjutnya bila dilihat pada kabupaten/kota lainnya, pendapatan yang sangat rendah adalah Kota Solok dengan penerimaan sebesar 283,562 milyar rupiah yang berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 18,574 milyar rupiah dan dana perimbangan sebesar 242,829 milyar rupiah. PAD Kota Solok berasal dari pajak daerah sebesar 1,879 milyar rupiah dan retribusi daerah sebesar 2,958 milyar rupiah, sedangkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah tercatat sebesar 3,716 milyar rupiah. Sementara dari sisi pengeluaran, Kota Solok telah mengeluarkan dana sebesar 317,288 milyar rupiah yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 175,734 milyar rupiah dan belanja langsung sebesar 141,554 milyar rupiah.

TABEL-TABEL

<https://sumbar.bps.go.id>

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat Menurut Komponen Penerimaan, 2010
(Rupiah)

Komponen Penerimaan	Nilai
A. Pendapatan Daerah	1 920 971 382 916
1. Pendapatan Asli Daerah	1 006 820 947 269
1.1 Pajak Daerah	768 724 373 140
1.2 Retribusi Daerah	28 264 853 996
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	46 814 066 878
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	163 017 653 255
2. Dana Perimbangan	785 574 959 177
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	108 756 199 177
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	662 403 385 000
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	14 415 375 000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	128 575 476 470
3.1 Pendapatan Hibah	80 463 880 329
3.2 Dana Darurat	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	48 111 596 141
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0
B. Pembiayaan Daerah	673 887 320 537
1. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	673 887 320 537
2. Penerimaan Pinjaman Daerah	0
Jumlah Penerimaan Daerah	2 594 858 703 453

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Se-Sumatera Barat Menurut Komponen Penerimaan, 2010
(Rupiah)

Komponen Penerimaan	Nilai
A. Pendapatan Daerah	9 182 820 268 713
1. Pendapatan Asli daerah	534 677 675 422
1.1 Pajak Daerah	148 218 033 445
1.2 Retribusi Daerah	132 585 047 538
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	73 356 061 555
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	180 518 532 884
2. Dana Perimbangan	7 569 179 841 325
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	625 787 018 225
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	6 257 102 848 100
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	686 289 975 000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1 078 962 751 966
3.1 Pendapatan Hibah	123 859 130 105
3.2 Dana Darurat	52 865 591 856
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	241 282 687 146
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	496 300 880 996
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	132 034 391 863
3.6 Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya	32 620 070 000
B. Pembiayaan Daerah	1 515 339 098 351
1. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1 500 607 577 453
2. Penerimaan Pembiayaan Daerah Lainnya	14 731 520 898
Jumlah Penerimaan Daerah	10 698 159 367 065

Tabel 1.1.1
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Menurut Komponen Penerimaan, 2010
(Rupiah)

Komponen Penerimaan	Nilai
A. Pendapatan Daerah	403 217 035 240
1. Pendapatan Asli daerah	28 354 294 717
1.1 Pajak Daerah	737 717 050
1.2 Retribusi Daerah	1 970 433 339
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10 161 239 720
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15 484 904 608
2. Dana Perimbangan	349 720 456 665
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34 655 275 165
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	290 918 556 500
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	24 146 625 000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	25 142 283 858
3.1 Pendapatan Hibah	0
3.2 Dana Darurat	11 400 000 000
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	12 462 573 858
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1 279 710 000
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0
B. Pembiayaan Daerah	281 308 666 926
1. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	281 308 666 926
2. Penerimaan Pinjaman Daerah	0
Jumlah Penerimaan Daerah	684 525 702 166

Tabel 1.1.2
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Komponen Penerimaan, 2010
(Rupiah)

Komponen Penerimaan	Nilai
A. Pendapatan Daerah	731 534 492 000
1. Pendapatan Asli daerah	17 595 930 000
1.1 Pajak Daerah	4 164 985 000
1.2 Retribusi Daerah	3 611 805 000
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 407 706 000
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7 411 434 000
2. Dana Perimbangan	544 513 285 000
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29 399 914 000
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	454 097 271 000
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	61 016 100 000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	169 425 277 000
3.1 Pendapatan Hibah	63 617 330 000
3.2 Dana Darurat	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	19 031 284 000
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	86 776 663 000
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0
B. Pembiayaan Daerah	48 991 690 000
1. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45 039 530 000
2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3 952 160 000
Jumlah Penerimaan Daerah	780 526 182 000

Tabel 1.1.3
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Solok Menurut Komponen Penerimaan, 2010
(Rupiah)

Komponen Penerimaan	Nilai
A. Pendapatan Daerah	553 370 428 815
1. Pendapatan Asli daerah	19 620 321 087
1.1 Pajak Daerah	3 151 114 119
1.2 Retribusi Daerah	4 161 797 839
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 119 449 687
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9 187 959 442
2. Dana Perimbangan	492 563 810 411
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26 660 474 411
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	415 421 036 000
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	50 482 300 000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	41 186 297 317
3.1 Pendapatan Hibah	0
3.2 Dana Darurat	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	16 663 697 317
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	23 904 200 000
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	618 400 000
B. Pembiayaan Daerah	33 835 365 564
1. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	33 337 889 064
2. Penerimaan Piutang Daerah	497 476 500
3. Lainnya	150 000 000
Jumlah Penerimaan Daerah	587 205 794 379

Tabel 1.1.4
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sijunjung Menurut Komponen Penerimaan, 2010
(Rupiah)

Komponen Penerimaan	Nilai
A. Pendapatan Daerah	439 095 674 257
1. Pendapatan Asli daerah	21 973 847 556
1.1 Pajak Daerah	2 783 306 249
1.2 Retribusi Daerah	3 934 984 215
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 210 280 845
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10 045 276 247
2. Dana Perimbangan	347 137 441 898
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24 061 565 898
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	291 098 176 000
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	31 977 700 000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	69 984 384 803
3.1 Pendapatan Hibah	2 095 874 700
3.2 Dana Darurat	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15 694 560 790
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	52 193 949 313
B. Pembiayaan Daerah	119 291 609 855
1. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	116 952 417 655
2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2 339 192 200
Jumlah Penerimaan Daerah	558 387 284 112

Tabel 1.1.5
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Datar Menurut Komponen Penerimaan, 2010
(Rupiah)

Komponen Penerimaan	Nilai
A. Pendapatan Daerah	562 413 800 000
1. Pendapatan Asli daerah	36 941 725 000
1.1 Pajak Daerah	4 633 265 000
1.2 Retribusi Daerah	3 059 931 000
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13 399 144 000
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15 849 385 000
2. Dana Perimbangan	459 592 731 000
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22 633 641 000
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	390 379 990 000
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	46 579 100 000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	65 879 344 000
3.1 Pendapatan Hibah	65 703 000
3.2 Dana Darurat	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15 587 954 000
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	46 834 687 000
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3 391 000 000
B. Pembiayaan Daerah	69 444 383 000
1. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	68 811 313 000
2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	633 070 000
Jumlah Penerimaan Daerah	631 858 183 000

Tabel 1.1.6
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Menurut Komponen Penerimaan, 2010
(Rupiah)

Komponen Penerimaan	Nilai
A. Pendapatan Daerah	664 535 072 392
1. Pendapatan Asli daerah	24 706 049 065
1.1 Pajak Daerah	7 534 415 689
1.2 Retribusi Daerah	3 828 514 885
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 553 627 142
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10 789 491 349
2. Dana Perimbangan	491 152 419 016
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21 080 729 016
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	417 865 290 000
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	52 206 400 000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	148 676 604 311
3.1 Pendapatan Hibah	5 754 792 275
3.2 Dana Darurat	36 483 353 096
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15 840 397 980
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	58 817 265 000
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	31 780 795 960
B. Pembiayaan Daerah	97 593 292 021
1. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	93 800 271 756
2. Penerimaan Piutang Daerah	3 793 020 265
Jumlah Penerimaan Daerah	762 128 364 413

Tabel 1.1.7
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Agam Menurut Komponen Penerimaan, 2010
(Rupiah)

Komponen Penerimaan	Nilai
A. Pendapatan Daerah	616 816 165 066
1. Pendapatan Asli daerah	22 952 165 617
1.1 Pajak Daerah	6 010 568 440
1.2 Retribusi Daerah	7 997 566 576
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 460 914 207
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5 483 116 394
2. Dana Perimbangan	514 796 260 119
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24 154 574 119
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	435 507 286 000
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	55 134 400 000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	79 067 739 330
3.1 Pendapatan Hibah	0
3.2 Dana Darurat	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17 219 382 730
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	61 503 956 600
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	344 400 000
B. Pembiayaan Daerah	38 930 872 671
1. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	38 930 872 671
2. Penerimaan Piutang Daerah	0
Jumlah Penerimaan Daerah	655 747 037 737

Tabel 1.1.8
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Komponen Penerimaan, 2010
(Rupiah)

Komponen Penerimaan	Nilai
A. Pendapatan Daerah	580 324 566 487
1. Pendapatan Asli daerah	17 435 267 406
1.1 Pajak Daerah	3 655 973 702
1.2 Retribusi Daerah	6 687 235 750
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 052 759 404
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5 039 298 550
2. Dana Perimbangan	487 125 011 079
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26 652 771 079
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	411 513 040 000
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	48 959 200 000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	75 764 288 002
3.1 Pendapatan Hibah	0
3.2 Dana Darurat	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15 343 348 108
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	57 935 939 894
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2 485 000 000
B. Pembiayaan Daerah	18 683 393 321
1. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15 549 525 052
2. Penerimaan Pinjaman Daerah	3 133 868 269
Jumlah Penerimaan Daerah	599 007 959 808

Tabel 1.1.9
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman Menurut Komponen Penerimaan, 2010
(Rupiah)

Komponen Penerimaan	Nilai
A. Pendapatan Daerah	440 561 770 668
1. Pendapatan Asli daerah	16 094 170 583
1.1 Pajak Daerah	2 960 976 259
1.2 Retribusi Daerah	5 179 957 177
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 123 034 803
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4 830 202 344
2. Dana Perimbangan	384 690 939 147
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25 133 820 147
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	323 271 519 000
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	36 285 600 000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	39 776 660 938
3.1 Pendapatan Hibah	37 049 025
3.2 Dana Darurat	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15 805 176 313
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	23 800 035 600
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	134 400 000
B. Pembiayaan Daerah	42 480 163 559
1. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	42 480 163 559
2. Penerimaan Piutang Daerah	0
Jumlah Penerimaan Daerah	483 041 934 227

Tabel 1.1.10
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Solok Selatan Menurut Komponen Penerimaan, 2010
(Rupiah)

Komponen Penerimaan	Nilai
A. Pendapatan Daerah	342 443 713 646
1. Pendapatan Asli daerah	7 360 806 893
1.1 Pajak Daerah	1 990 120 045
1.2 Retribusi Daerah	2 903 227 495
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 115 652 326
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1 351 807 027
2. Dana Perimbangan	301 261 825 667
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27 242 962 067
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	245 504 063 600
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	28 514 800 000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	33 821 081 086
3.1 Pendapatan Hibah	16 959 886 342
3.2 Dana Darurat	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	16 244 194 744
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	617 000 000
B. Pembiayaan Daerah	29 910 968 062
1. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	29 496 439 398
2. Penerimaan Pinjaman Daerah	414 528 664
Jumlah Penerimaan Daerah	372 354 681 708

Tabel 1.1.11
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Dharmasraya Menurut Komponen Penerimaan, 2010
(Rupiah)

Komponen Penerimaan	Nilai
A. Pendapatan Daerah	432 488 449 352
1. Pendapatan Asli daerah	25 541 706 459
1.1 Pajak Daerah	4 051 589 756
1.2 Retribusi Daerah	10 248 647 179
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 068 043 895
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8 173 425 629
2. Dana Perimbangan	333 450 451 531
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29 789 530 331
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	266 175 621 200
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	37 485 300 000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	73 496 291 362
3.1 Pendapatan Hibah	0
3.2 Dana Darurat	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	16 162 451 460
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	57 245 639 902
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	88 200 000
B. Pembiayaan Daerah	42 610 246 896
1. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	42 610 246 896
2. Penerimaan Piutang Daerah	0
Jumlah Penerimaan Daerah	475 098 696 248

Tabel 1.1.12
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Menurut Komponen Penerimaan, 2010
(Rupiah)

Komponen Penerimaan	Nilai
A. Pendapatan Daerah	476 920 522 771
1. Pendapatan Asli daerah	24 205 105 536
1.1 Pajak Daerah	5 461 743 911
1.2 Retribusi Daerah	6 177 364 911
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	435 364 882
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12 130 631 832
2. Dana Perimbangan	428 562 124 525
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28 067 265 725
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	350 371 158 800
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	50 123 700 000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	24 153 292 710
3.1 Pendapatan Hibah	0
3.2 Dana Darurat	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	14 842 492 710
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9 231 000 000
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	79 800 000
B. Pembiayaan Daerah	63 311 725 550
1. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	63 311 725 550
2. Pencairan Dana Cadangan	0
Jumlah Penerimaan Daerah	540 232 248 321

Tabel 1.1.13
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kota Padang Menurut Komponen Penerimaan, 2010
(Rupiah)

Komponen Penerimaan	Nilai
A. Pendapatan Daerah	1 040 019 734 770
1. Pendapatan Asli daerah	116 691 283 830
1.1 Pajak Daerah	77 639 340 550
1.2 Retribusi Daerah	21 985 780 440
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 293 729 120
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11 772 433 720
2. Dana Perimbangan	866 142 644 640
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	190 509 687 640
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	632 117 457 000
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	43 515 500 000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	57 185 806 300
3.1 Pendapatan Hibah	32 591 866 300
3.2 Dana Darurat	2 225 250 000
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	22 368 690 000
B. Pembiayaan Daerah	107 348 295 910
1. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	107 348 295 910
2. Penerimaan Piutang Daerah	0
Jumlah Penerimaan Daerah	1 147 368 030 680

Tabel 1.1.14
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kota Solok Menurut Komponen Penerimaan, 2010
(Rupiah)

Komponen Penerimaan	Nilai
A. Pendapatan Daerah	283 562 213 568
1. Pendapatan Asli daerah	18 574 273 780
1.1 Pajak Daerah	1 878 901 842
1.2 Retribusi Daerah	2 958 048 980
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 716 430 768
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10 020 892 190
2. Dana Perimbangan	242 829 016 609
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18 902 653 609
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	210 134 688 000
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	13 791 675 000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	22 158 923 179
3.1 Pendapatan Hibah	2 720 879 463
3.2 Dana Darurat	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	8 607 322 116
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	10 523 121 600
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	307 600 000
B. Pembiayaan Daerah	137 449 615 902
1. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	138 638 615 902
2. Penerimaan Piutang Daerah	0
Jumlah Penerimaan Daerah	422 200 829 470

Tabel 1.1.15
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kota Sawahlunto Menurut Komponen Penerimaan, 2010
(Rupiah)

Komponen Penerimaan	Nilai
A. Pendapatan Daerah	313 373 774 000
1. Pendapatan Asli daerah	23 782 089 000
1.1 Pajak Daerah	1 932 702 000
1.2 Retribusi Daerah	13 611 889 000
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 416 521 000
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6 651 328 000
2. Dana Perimbangan	239 611 108 000
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18 462 029 000
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	202 073 979 000
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	19 075 100 000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	49 980 577 000
3.1 Pendapatan Hibah	15 749 000
3.2 Dana Darurat	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	7 404 579 000
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9 940 179 000
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	397 600 000
3.6 Dana Percepatan Pemerintah Daerah	32 620 070 000
B. Pembiayaan Daerah	31 555 677 000
1. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	31 555 677 000
2. Penerimaan Piutang Daerah	0
Jumlah Penerimaan Daerah	344 929 451 000

Tabel 1.1.16
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang Menurut Komponen Penerimaan, 2010
(Rupiah)

Komponen Penerimaan	Nilai
A. Pendapatan Daerah	287 891 441 000
1. Pendapatan Asli daerah	27 476 168 000
1.1 Pajak Daerah	1 917 441 000
1.2 Retribusi Daerah	14 258 538 000
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 225 933 000
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9 074 256 000
2. Dana Perimbangan	252 000 358 000
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19 412 698 000
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	194 866 985 000
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	37 720 675 000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8 414 915 000
3.1 Pendapatan Hibah	0
3.2 Dana Darurat	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	8 414 915 000
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0
B. Pembiayaan Daerah	70 892 958 000
1. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	70 924 753 000
2. Penerimaan Piutang Daerah	- 31 795 000
Jumlah Penerimaan Daerah	358 784 399 000

Tabel 1.1.17
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kota Bukittinggi Menurut Komponen Penerimaan, 2010
(Rupiah)

Komponen Penerimaan	Nilai
A. Pendapatan Daerah	338 421 473 678
1. Pendapatan Asli daerah	33 847 174 752
1.1 Pajak Daerah	11 728 705 362
1.2 Retribusi Daerah	12 609 756 529
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 829 523 928
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7 679 188 933
2. Dana Perimbangan	279 481 878 176
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18 988 138 176
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	242 306 440 000
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	18 187 300 000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	25 092 420 750
3.1 Pendapatan Hibah	0
3.2 Dana Darurat	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9 110 622 360
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15 981 798 390
B. Pembiayaan Daerah	90 458 297 347
1. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	90 458 297 347
2. Penerimaan Piutang Daerah	0
Jumlah Penerimaan Daerah	428 879 771 025

Tabel 1.1.18
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kota Payakumbuh Menurut Komponen Penerimaan, 2010
(Rupiah)

Komponen Penerimaan	Nilai
A. Pendapatan Daerah	329 136 225 165
1. Pendapatan Asli daerah	36 640 757 490
1.1 Pajak Daerah	3 302 924 301
1.2 Retribusi Daerah	7 435 333 849
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 368 049 743
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21 534 449 597
2. Dana Perimbangan	277 361 235 695
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18 751 680 695
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	246 791 255 000
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	11 818 300 000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	15 134 231 980
3.1 Pendapatan Hibah	0
3.2 Dana Darurat	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9 404 198 780
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	4 701 675 000
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1 028 358 200
B. Pembiayaan Daerah	74 109 280 563
1. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	74 109 280 563
2. Penerimaan Piutang Daerah	0
Jumlah Penerimaan Daerah	403 245 505 728

Tabel 1.1.19
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kota Pariaman Menurut Komponen Penerimaan, 2010
(Rupiah)

Komponen Penerimaan	Nilai
A. Pendapatan Daerah	346 693 715 838
1. Pendapatan Asli daerah	14 884 538 651
1.1 Pajak Daerah	2 682 243 170
1.2 Retribusi Daerah	1 794 586 374
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 398 657 085
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8 009 052 022
2. Dana Perimbangan	277 186 844 147
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21 227 608 147
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	236 689 036 000
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	19 270 200 000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	54 622 333 040
3.1 Pendapatan Hibah	0
3.2 Dana Darurat	2 756 988 760
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	7 443 535 880
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	43 806 808 400
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	615 000 000
B. Pembiayaan Daerah	115 943 596 204
1. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	115 943 596 204
2. Penerimaan Piutang Daerah	0
Jumlah Penerimaan Daerah	462 637 312 042

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Daerah
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten :</u>	
1. Kepulauan Mentawai	403 217 035 240
2. Pesisir Selatan	731 534 492 000
3. Solok	553 370 428 815
4. Sijunjung	439 095 674 257
5. Tanah Datar	562 413 800 000
6. Padang Pariaman	664 535 072 392
7. Agam	616 816 165 066
8. Lima Puluh Kota	580 324 566 487
9. Pasaman	440 561 770 668
10. Solok Selatan	342 443 713 646
11. Dharmasraya	432 488 449 352
12. Pasaman Barat	476 920 522 771
<u>Kota :</u>	
13. Padang	1 040 019 734 770
14. Solok	283 562 213 568
15. Sawahlunto	313 373 774 000
16. Padang Panjang	287 891 441 000
17. Bukittinggi	338 421 473 678
18. Payakumbuh	329 136 225 165
19. Pariaman	346 693 715 838
Sumatera Barat	1 920 971 382 916

Tabel 2.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten</u>	
1. Kepulauan Mentawai	28 354 294 717
2. Pesisir Selatan	17 595 930 000
3. S o l o k	19 620 321 087
4. Sijunjung	21 973 847 556
5. Tanah Datar	36 941 725 000
6. Padang Pariaman	24 706 049 065
7. A g a m	22 952 165 617
8. Lima Puluh Kota	17 435 267 406
9. Pasaman	16 094 170 583
10. Solok Selatan	7 360 806 893
11. Dharmasraya	25 541 706 459
12. Pasaman Barat	24 205 105 536
<u>Kota:</u>	
13. Padang	116 691 283 830
14. S o l o k	18 574 273 780
15. Sawahlunto	23 782 089 000
16. Padang Panjang	27 476 168 000
17. Bukittinggi	33 847 174 752
18. Payakumbuh	36 640 757 490
19. Pariaman	14 884 538 651
Sumatera Barat	1 006 820 947 269

Tabel 2.1.1
Realisasi Pajak Daerah
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten</u>	
1. Kepulauan Mentawai	737 717 050
2. Pesisir Selatan	4 164 985 000
3. Solok	3 151 114 119
4. Sijunjung	2 783 306 249
5. Tanah Datar	4 633 265 000
6. Padang Pariaman	7 534 415 689
7. Agam	6 010 568 440
8. Lima Puluh Kota	3 655 973 702
9. Pasaman	2 960 976 259
10. Solok Selatan	1 990 120 045
11. Dharmasraya	4 051 589 756
12. Pasaman Barat	5 461 743 911
<u>Kota:</u>	
13. Padang	77 639 340 550
14. Solok	1 878 901 842
15. Sawahlunto	1 932 702 000
16. Padang Panjang	1 917 441 000
17. Bukittinggi	11 728 705 362
18. Payakumbuh	3 302 924 301
19. Pariaman	2 682 243 170
Sumatera Barat	768 724 373 140

Tabel 2.1.2
Realisasi Retribusi Daerah
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten</u>	
1. Kepulauan Mentawai	1 970 433 339
2. Pesisir Selatan	3 611 805 000
3. S o l o k	4 161 797 839
4. Sijunjung	3 934 984 215
5. Tanah Datar	3 059 931 000
6. Padang Pariaman	3 828 514 885
7. A g a m	7 997 566 576
8. Lima Puluh Kota	6 687 235 750
9. Pasaman	5 179 957 177
10. Solok Selatan	2 903 227 495
11. Dharmasraya	10 248 647 179
12. Pasaman Barat	6 177 364 911
<u>Kota:</u>	
13. Padang	21 985 780 440
14. S o l o k	2 958 048 980
15. Sawahlunto	13 611 889 000
16. Padang Panjang	14 258 538 000
17. Bukittinggi	12 609 756 529
18. Payakumbuh	7 435 333 849
19. Pariaman	1 794 586 374
Sumatera Barat	28 264 853 996

Tabel 2.1.3
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2010 (Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten</u>	
1. Kepulauan Mentawai	10 161 239 720
2. Pesisir Selatan	2 407 706 000
3. S o l o k	9 187 959 442
4. Sijunjung	5 210 280 845
5. Tanah Datar	13 399 144 000
6. Padang Pariaman	2 553 627 142
7. A g a m	3 460 914 207
8. Lima Puluh Kota	2 052 759 404
9. Pasaman	3 123 034 803
10. Solok Selatan	1 115 652 326
11. Dharmasraya	3 068 043 895
12. Pasaman Barat	435 364 882
<u>K o t a :</u>	
13. Padang	5 293 729 120
14. S o l o k	3 716 430 768
15. Sawahlunto	3 416 521 000
16. Padang Panjang	2 225 933 000
17. Bukittinggi	1 829 523 928
18. Payakumbuh	4 368 049 743
19. Pariaman	2 398 657 085
Sumatera Barat	46 814 066 878

Tabel 2.1.4
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten</u>	
1. Kepulauan Mentawai	15 484 904 608
2. Pesisir Selatan	7 411 434 000
3. Solok	9 187 959 442
4. Sijunjung	10 045 276 247
5. Tanah Datar	15 849 385 000
6. Padang Pariaman	10 789 491 349
7. Agam	5 483 116 394
8. Lima Puluh Kota	5 039 298 550
9. Pasaman	4 830 202 344
10. Solok Selatan	1 351 807 027
11. Dharmasraya	8 173 425 629
12. Pasaman Barat	12 130 631 832
<u>Kota:</u>	
13. Padang	11 772 433 720
14. Solok	10 020 892 190
15. Sawahlunto	6 651 328 000
16. Padang Panjang	9 074 256 000
17. Bukittinggi	7 679 188 933
18. Payakumbuh	21 534 449 597
19. Pariaman	8 009 052 022
Sumatera Barat	163 017 653 255

Tabel 2.2
Realisasi Dana Perimbangan
Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2010 (Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten</u>	
1. Kepulauan Mentawai	349 720 456 665
2. Pesisir Selatan	544 513 285 000
3. Solok	492 563 810 411
4. Sijunjung	347 137 441 898
5. Tanah Datar	459 592 731 000
6. Padang Pariaman	491 152 419 016
7. Agam	514 796 260 119
8. Lima Puluh Kota	487 125 011 079
9. Pasaman	384 690 939 147
10. Solok Selatan	301 261 825 667
11. Dharmasraya	333 450 451 531
12. Pasaman Barat	428 562 124 525
<u>Kota:</u>	
13. Padang	866 142 644 640
14. Solok	242 829 016 609
15. Sawahlunto	239 611 108 000
16. Padang Panjang	252 000 358 000
17. Bukittinggi	279 481 878 176
18. Payakumbuh	277 361 235 695
19. Pariaman	277 186 844 147
Sumatera Barat	785 574 959 177

Tabel 2.2.1
Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten</u>	
1. Kepulauan Mentawai	34 655 275 165
2. Pesisir Selatan	29 399 914 000
3. Solok	26 660 474 411
4. Sijunjung	24 061 565 898
5. Tanah Datar	22 633 641 000
6. Padang Pariaman	21 080 729 016
7. Agam	24 154 574 119
8. Lima Puluh Kota	26 652 771 079
9. Pasaman	25 133 820 147
10. Solok Selatan	27 242 962 067
11. Dharmasraya	29 789 530 331
12. Pasaman Barat	28 067 265 725
<u>Kota:</u>	
13. Padang	190 509 687 640
14. Solok	18 902 653 609
15. Sawahlunto	18 462 029 000
16. Padang Panjang	19 412 698 000
17. Bukittinggi	18 988 138 176
18. Payakumbuh	18 751 680 695
19. Pariaman	21 227 608 147
Sumatera Barat	108 756 199 177

Tabel 2.2.2
Realisasi Dana Alokasi Umum
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten</u>	
1. Kepulauan Mentawai	290 918 556 500
2. Pesisir Selatan	454 097 271 000
3. S o l o k	415 421 036 000
4. Sijunjung	291 098 176 000
5. Tanah Datar	390 379 990 000
6. Padang Pariaman	417 865 290 000
7. A g a m	435 507 286 000
8. Lima Puluh Kota	411 513 040 000
9. Pasaman	323 271 519 000
10. Solok Selatan	245 504 063 600
11. Dharmasraya	266 175 621 200
12. Pasaman Barat	350 371 158 800
<u>K o t a :</u>	
13. Padang	632 117 457 000
14. S o l o k	210 134 688 000
15. Sawahlunto	202 073 979 000
16. Padang Panjang	194 866 985 000
17. Bukittinggi	242 306 440 000
18. Payakumbuh	246 791 255 000
19. Pariaman	236 689 036 000
Sumatera Barat	662 403 385 000

Tabel 2.2.3
Realisasi Dana Alokasi Khusus
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten</u>	
1. Kepulauan Mentawai	24 146 625 000
2. Pesisir Selatan	61 016 100 000
3. S o l o k	50 482 300 000
4. Sijunjung	31 977 700 000
5. Tanah Datar	46 579 100 000
6. Padang Pariaman	52 206 400 000
7. A g a m	55 134 400 000
8. Lima Puluh Kota	48 959 200 000
9. Pasaman	36 285 600 000
10. Solok Selatan	28 514 800 000
11. Dharmasraya	37 485 300 000
12. Pasaman Barat	50 123 700 000
<u>Kota:</u>	
13. Padang	43 515 500 000
14. S o l o k	13 791 675 000
15. Sawahlunto	19 075 100 000
16. Padang Panjang	37 720 675 000
17. Bukittinggi	18 187 300 000
18. Payakumbuh	11 818 300 000
19. Pariaman	19 270 200 000
Sumatera Barat	14 415 375 000

Tabel 2.3
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten :</u>	
1. Kepulauan Mentawai	25 142 283 858
2. Pesisir Selatan	169 425 277 000
3. S o l o k	41 186 297 317
4. Sijunjung	69 984 384 803
5. Tanah Datar	65 879 344 000
6. Padang Pariaman	148 676 604 311
7. A g a m	79 067 739 330
8. Lima Puluh Kota	75 764 288 002
9. Pasaman	39 776 660 938
10. Solok Selatan	33 821 081 086
11. Dharmasraya	73 496 291 362
12. Pasaman Barat	24 153 292 710
<u>Kota :</u>	
13. Padang	57 185 806 300
14. S o l o k	22 158 923 179
15. Sawahlunto	49 980 577 000
16. Padang Panjang	8 414 915 000
17. Bukittinggi	25 092 420 750
18. Payakumbuh	15 134 231 980
19. Pariaman	54 622 333 040
Sumatera Barat	128 575 476 470

Tabel 2.4
Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten :</u>	
1. Kepulauan Mentawai	281 308 666 926
2. Pesisir Selatan	48 991 690 000
3. Solok	33 835 365 564
4. Sijunjung	119 291 609 855
5. Tanah Datar	69 444 383 000
6. Padang Pariaman	97 593 292 021
7. Agam	38 930 872 671
8. Lima Puluh Kota	18 683 393 321
9. Pasaman	42 480 163 559
10. Solok Selatan	29 910 968 062
11. Dharmasraya	42 610 246 896
12. Pasaman Barat	63 311 725 550
<u>Kota :</u>	
13. Padang	107 348 295 910
14. Solok	137 449 615 902
15. Sawahlunto	31 555 677 000
16. Padang Panjang	70 892 958 000
17. Bukittinggi	90 458 297 347
18. Payakumbuh	74 109 280 563
19. Pariaman	115 943 596 204
Sumatera Barat	673 887 320 537

Tabel 3
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat Menurut Komponen Pengeluaran, 2010
(Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai
A. Belanja Daerah	2 239 753 491 320
1. Belanja Tidak Langsung	1 031 743 731 585
1.1 Belanja Pegawai	452 838 727 813
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	327 188 371 370
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	91 901 539 022
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	5 227 193 000
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	28 521 624 421
1.1.5 Lainnya	0
1.2 Belanja Bunga	0
1.3 Belanja Subsidi	0
1.4 Belanja Hibah	56 700 222 061
1.5 Belanja Bantuan Sosial	55 567 603 553
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	290 666 129 173
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	172 924 980 350
1.8 Belanja Tidak Terduga	3 046 068 635
2. Belanja Langsung	1 208 009 759 735
2.1 Belanja Pegawai	79 094 896 118
2.2 Belanja Barang dan Jasa	545 847 299 548
2.3 Belanja Modal	583 067 564 069
B. Pembiayaan Daerah	355 105 212 133
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	335 221 212 133
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	19 884 000 000
Jumlah Pengeluaran Daerah	2 594 858 703 453

Tabel 3.1
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Se-Sumatera Barat Menurut Komponen Pengeluaran, 2010
(Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai
A. Belanja Daerah	9 432 391 982 519
1. Belanja Tidak Langsung	6 238 656 129 900
1.1 Belanja Pegawai	5 353 049 066 597
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	4 340 998 067 68
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	803 343 763 289
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	27 887 948 489
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	9 792 742 272
1.1.5 Lainnya	171 026 551 779
1.2 Belanja Bunga	5 254 653
1.3 Belanja Subsidi	2 571 724 600
1.4 Belanja Hibah	313 381 222 637
1.5 Belanja Bantuan Sosial	263 267 992 559
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7 825 384 641
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	254 132 215 788
1.8 Belanja Tidak Terduga	44 423 268 425
2. Belanja Langsung	3 193 735 852 619
2.1 Belanja Pegawai	398 294 646 010
2.2 Belanja Barang dan Jasa	1 341 980 416 617
2.3 Belanja Modal	1 453 460 789 992
B. Pembiayaan Daerah	1 275 631 577 932
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	1 190 561 303 760
2. Lainnya	85 070 274 172
Jumlah Pengeluaran Daerah	10 708 023 560 452

Tabel 3.1.1
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Menurut Komponen Pengeluaran, 2010
(Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai
A. Belanja Daerah	458 396 222 433
1. Belanja Tidak Langsung	206 086 174 274
1.1 Belanja Pegawai	127 950 513 274
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	74 163 554 254
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	52 478 959 020
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1 308 000 000
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	0
1.1.5 Lainnya	0
1.2 Belanja Bunga	0
1.3 Belanja Subsidi	0
1.4 Belanja Hibah	15 495 000 000
1.5 Belanja Bantuan Sosial	56 340 661 000
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4 300 000 000
1.8 Belanja Tidak Terduga	2 000 000 000
2. Belanja Langsung	252 310 048 159
2.1 Belanja Pegawai	33 145 690 400
2.2 Belanja Barang dan Jasa	118 344 469 738
2.3 Belanja Modal	100 819 888 021
B. Pembiayaan Daerah	226 129 479 733
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	222 689 479 733
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3 440 000 000
Jumlah Pengeluaran Daerah	684 525 702 166

Tabel 3.1.2
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Komponen Pengeluaran, 2010
(Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai
A. Belanja Daerah	725 141 398 000
1. Belanja Tidak Langsung	499 150 074 000
1.1 Belanja Pegawai	416 161 742 000
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	411 124 740 000
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	0
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	5 037 002 000
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	0
1.1.5 Lainnya	0
1.2 Belanja Bunga	0
1.3 Belanja Subsidi	0
1.4 Belanja Hibah	11 392 448 000
1.5 Belanja Bantuan Sosial	4 942 251 000
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	284 030 000
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	65 332 898 000
1.8 Belanja Tidak Terduga	1 036 705 000
2. Belanja Langsung	225 991 324 000
2.1 Belanja Pegawai	8 655 219 000
2.2 Belanja Barang dan Jasa	90 411 499 000
2.3 Belanja Modal	126 924 606 000
B. Pembiayaan Daerah	55 384 784 000
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	53 619 463 000
2. Pembayaran Pokok Utang	1 765 321 000
Jumlah Pengeluaran Daerah	780 526 182 000

Tabel 3.1.3
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Solok Menurut Komponen Pengeluaran, 2010
(Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai
A. Belanja Daerah	537 104 294 497
1. Belanja Tidak Langsung	410 278 372 755
1.1 Belanja Pegawai	364 746 778 609
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	278 356 675 806
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	84 584 959 791
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1 292 880 000
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	512 263 012
1.1.5 Lainnya	0
1.2 Belanja Bunga	0
1.3 Belanja Subsidi	0
1.4 Belanja Hibah	20 302 783 760
1.5 Belanja Bantuan Sosial	5 756 048 674
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 007 470 481
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	17 843 141 231
1.8 Belanja Tidak Terduga	622 150 000
2. Belanja Langsung	126 825 921 742
2.1 Belanja Pegawai	3 745 946 790
2.2 Belanja Barang dan Jasa	67 681 537 957
2.3 Belanja Modal	55 398 436 995
B. Pembiayaan Daerah	50 101 499 881
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	49 601 749 881
2. Pemberian Pinjaman Daerah	499 750 000
Jumlah Pengeluaran Daerah	587 205 794 378

Tabel 3.1.4
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Sijunjung Menurut Komponen Pengeluaran, 2010
(Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai
A. Belanja Daerah	494 231 196 770
1. Belanja Tidak Langsung	277 951 360 631
1.1 Belanja Pegawai	225 476 199 884
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	177 068 157 536
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	47 045 311 351
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	930 000 000
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	432 730 997
1.1.5 Lainnya	0
1.2 Belanja Bunga	0
1.3 Belanja Subsidi	1 486 399 600
1.4 Belanja Hibah	21 843 567 878
1.5 Belanja Bantuan Sosial	8 321 967 486
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	360 584 241
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15 733 129 642
1.8 Belanja Tidak Terduga	4 729 511 900
2. Belanja Langsung	216 279 836 139
2.1 Belanja Pegawai	20 422 999 667
2.2 Belanja Barang dan Jasa	64 612 905 550
2.3 Belanja Modal	131 243 930 922
B. Pembiayaan Daerah	64 156 087 346
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	59 286 087 346
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2 870 000 000
3. Pemberian Pinjaman Daerah	2 000 000 000
Jumlah Pengeluaran Daerah	558 387 284 116

Tabel 3.1.5
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Datar Menurut Komponen Pengeluaran, 2010
(Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai
A. Belanja Daerah	568 631 590 000
1. Belanja Tidak Langsung	456 151 012 000
1.1 Belanja Pegawai	404 385 774 000
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	343 691 875 000
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	59 210 339 000
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1 182 000 000
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	301 560 000
1.1.5 Lainnya	0
1.2 Belanja Bunga	0
1.3 Belanja Subsidi	0
1.4 Belanja Hibah	16 350 580 000
1.5 Belanja Bantuan Sosial	16 994 319 000
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	671 090 000
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	16 334 250 000
1.8 Belanja Tidak Terduga	1 414 999 000
2. Belanja Langsung	112 480 578 000
2.1 Belanja Pegawai	22 820 396 000
2.2 Belanja Barang dan Jasa	53 234 566 000
2.3 Belanja Modal	36 425 616 000
B. Pembiayaan Daerah	63 226 593 000
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	63 226 593 000
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0
Jumlah Pengeluaran Daerah	631 858 183 000

Tabel 3.1.6
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Menurut Komponen Pengeluaran, 2010
(Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai
A. Belanja Daerah	710 430 206 244
1. Belanja Tidak Langsung	541 193 296 321
1.1 Belanja Pegawai	424 696 885 291
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	327 289 266 094
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	95 701 604 632
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1 182 000 000
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	524 014 565
1.1.5 Lainnya	0
1.2 Belanja Bunga	0
1.3 Belanja Subsidi	0
1.4 Belanja Hibah	17 544 674 026
1.5 Belanja Bantuan Sosial	87 614 272 143
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	658 655 913
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9 768 099 323
1.8 Belanja Tidak Terduga	910 709 625
2. Belanja Langsung	169 236 909 923
2.1 Belanja Pegawai	10 651 605 500
2.2 Belanja Barang dan Jasa	73 164 238 042
2.3 Belanja Modal	85 421 066 381
B. Pembiayaan Daerah	51 698 158 169
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	51 698 158 169
2. Pembayaran Pokok Utang	0
Jumlah Pengeluaran Daerah	762 128 364 413

Tabel 3.1.7
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Agam Menurut Komponen Pengeluaran, 2010
(Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai
A. Belanja Daerah	594 603 515 017
1. Belanja Tidak Langsung	471 173 692 058
1.1 Belanja Pegawai	416 512 671 497
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	355 452 816 156
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	26 980 029 995
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1 371 068 050
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	530 159 096
1.1.5 Lainnya	32 178 598 200
1.2 Belanja Bunga	0
1.3 Belanja Subsidi	0
1.4 Belanja Hibah	19 297 269 031
1.5 Belanja Bantuan Sosial	11 718 516 401
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	22 472 359 629
1.8 Belanja Tidak Terduga	1 172 875 500
2. Belanja Langsung	123 429 822 959
2.1 Belanja Pegawai	16 806 266 459
2.2 Belanja Barang dan Jasa	62 165 495 105
2.3 Belanja Modal	44 458 061 395
2.4 Transfer	0
B. Pembiayaan Daerah	61 143 521 720
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	59 727 965 520
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 081 000 000
3. Pembayaran Pokok Utang	334 556 200
Jumlah Pengeluaran Daerah	655 747 036 737

Tabel 3.1.8
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Komponen Pengeluaran, 2010
(Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai
A. Belanja Daerah	551 919 311 773
1. Belanja Tidak Langsung	415 313 373 852
1.1 Belanja Pegawai	375 580 543 667
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	307 135 706 557
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	66 333 300 450
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1 146 846 345
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	964 690 315
1.1.5 Lainnya	0
1.2 Belanja Bunga	0
1.3 Belanja Subsidi	0
1.4 Belanja Hibah	22 959 910 329
1.5 Belanja Bantuan Sosial	1 604 350 000
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13 652 410 856
1.8 Belanja Tidak Terduga	1 516 159 000
2. Belanja Langsung	136 605 937 921
2.1 Belanja Pegawai	19 193 565 244
2.2 Belanja Barang dan Jasa	44 034 396 985
2.3 Belanja Modal	73 377 975 692
B. Pembiayaan Daerah	47 088 648 075
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	46 865 141 600
2. Pembayaran Pokok Utang	223 491 476
3. Lainnya (Surplus/Defisit)	14 999
Jumlah Pengeluaran Daerah	599 007 959 848

Tabel 3.1.9
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman Menurut Komponen Pengeluaran, 2010
(Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai
A. Belanja Daerah	439 038 321 696
1. Belanja Tidak Langsung	317 562 679 125
1.1 Belanja Pegawai	278 467 623 630
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	201 561 620 082
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	35 144 347 442
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1 034 400 000
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	897 299 718
1.1.5 Lainnya	39 829 956 388
1.2 Belanja Bunga	0
1.3 Belanja Subsidi	0
1.4 Belanja Hibah	20 401 495 846
1.5 Belanja Bantuan Sosial	4 904 994 000
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	257 879 199
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9 590 180 450
1.8 Belanja Tidak Terduga	3 940 506 000
2. Belanja Langsung	121 475 642 571
2.1 Belanja Pegawai	9 537 597 950
2.2 Belanja Barang dan Jasa	70 876 919 757
2.3 Belanja Modal	41 061 124 864
B. Pembiayaan Daerah	44 003 612 590
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	43 503 612 590
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500 000 000
Jumlah Pengeluaran Daerah	483 041 934 286

Tabel 3.1.10
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Solok Selatan Menurut Komponen Pengeluaran, 2010
(Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai
A. Belanja Daerah	319 351 847 911
1. Belanja Tidak Langsung	181 120 285 805
1.1 Belanja Pegawai	153 234 042 737
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	118 269 263 043
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	33 095 244 469
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	961 675 404
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	545 010 521
1.1.5 Lainnya	362 849 300
1.2 Belanja Bunga	0
1.3 Belanja Subsidi	0
1.4 Belanja Hibah	16 532 780 200
1.5 Belanja Bantuan Sosial	1 385 088 600
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9 035 687 468
1.8 Belanja Tidak Terduga	932 686 800
2. Belanja Langsung	138 231 562 106
2.1 Belanja Pegawai	12 598 697 590
2.2 Belanja Barang dan Jasa	49 994 271 774
2.3 Belanja Modal	75 638 592 742
B. Pembiayaan Daerah	53 002 833 797
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	53 002 833 797
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0
Jumlah Pengeluaran Daerah	372 354 681 708

Tabel 3.1.11
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Dharmasraya Menurut Komponen Pengeluaran, 2010
(Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai
A. Belanja Daerah	453 188 540 605
1. Belanja Tidak Langsung	247 210 353 093
1.1 Belanja Pegawai	211 755 478 214
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	137 528 241 707
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	71 715 414 442
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1 707 100 000
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	163 879 444
1.1.5 Lainnya	640 842 621
1.2 Belanja Bunga	0
1.3 Belanja Subsidi	0
1.4 Belanja Hibah	19 502 215 696
1.5 Belanja Bantuan Sosial	2 815 433 183
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12 863 226 000
1.8 Belanja Tidak Terduga	274 000 000
2. Belanja Langsung	205 978 187 512
2.1 Belanja Pegawai	22 655 617 696
2.2 Belanja Barang dan Jasa	71 126 957 561
2.3 Belanja Modal	112 195 612 255
B. Pembiayaan Daerah	21 910 155 043
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	21 910 155 043
2. Pembayaran Pokok Utang	0
Jumlah Pengeluaran Daerah	475 098 695 648

Tabel 3.1.12
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Menurut Komponen Pengeluaran, 2010
(Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai
A. Belanja Daerah	490 644 367 648
1. Belanja Tidak Langsung	282 218 107 025
1.1 Belanja Pegawai	255 849 934 424
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	208 900 311 524
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	44 397 485 000
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2 238 600 000
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	313 537 900
1.1.5 Lainnya	0
1.2 Belanja Bunga	0
1.3 Belanja Subsidi	0
1.4 Belanja Hibah	15 154 794 095
1.5 Belanja Bantuan Sosial	3 437 876 530
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	284 009 807
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5 691 492 169
1.8 Belanja Tidak Terduga	1 800 000 000
2. Belanja Langsung	208 426 260 623
2.1 Belanja Pegawai	22 896 257 095
2.2 Belanja Barang dan Jasa	84 389 084 379
2.3 Belanja Modal	101 140 919 149
B. Pembiayaan Daerah	49 587 880 673
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	49 587 880 673
2. Pembentukan Dana Cadangan	0
Jumlah Pengeluaran Daerah	540 232 248 321

Tabel 3.1.13
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kota Padang Menurut Komponen Pengeluaran, 2010
(Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai
A. Belanja Daerah	1 100 368 159 520
1. Belanja Tidak Langsung	803 197 038 410
1.1 Belanja Pegawai	720 736 966 580
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	582 107 921 610
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	52 953 770 610
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2 660 419 690
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	3 720 232 600
1.1.5 Lainnya	79 294 622 070
1.2 Belanja Bunga	0
1.3 Belanja Subsidi	0
1.4 Belanja Hibah	24 862 169 050
1.5 Belanja Bantuan Sosial	13 168 399 800
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	39 188 412 180
1.8 Belanja Tidak Terduga	5 241 090 800
2. Belanja Langsung	297 171 121 110
2.1 Belanja Pegawai	32 264 497 360
2.2 Belanja Barang dan Jasa	130 670 689 750
2.3 Belanja Modal	134 235 934 000
B. Pembiayaan Daerah	46 999 871 360
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	46 923 210 910
2. Pembayaran Pokok Utang	76 660 450
Jumlah Pengeluaran Daerah	1 147 368 030 880

Tabel 3.1.14
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kota Solok Menurut Komponen Pengeluaran, 2010
(Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai
A. Belanja Daerah	317 287 566 518
1. Belanja Tidak Langsung	175 733 716 907
1.1 Belanja Pegawai	144 515 466 789
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	144 515 466 789
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	0
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	0
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	0
1.1.5 Lainnya	0
1.2 Belanja Bunga	0
1.3 Belanja Subsidi	0
1.4 Belanja Hibah	20 116 515 433
1.5 Belanja Bantuan Sosial	3 303 859 685
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0
1.8 Belanja Tidak Terduga	7 797 875 000
2. Belanja Langsung	141 553 849 611
2.1 Belanja Pegawai	19 344 658 500
2.2 Belanja Barang dan Jasa	72 221 285 674
2.3 Belanja Modal	49 987 905 437
B. Pembiayaan Daerah	104 913 262 952
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	103 724 262 952
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 139 000 000
3. Pemberian Pinjaman Daerah	50 000 000
Jumlah Pengeluaran Daerah	422 200 829 470

Tabel 3.1.15
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kota Sawahlunto Menurut Komponen Pengeluaran, 2010
(Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai
A. Belanja Daerah	308 113 535 000
1. Belanja Tidak Langsung	190 280 032 000
1.1 Belanja Pegawai	168 932 293 000
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	166 439 516 000
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	0
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2 492 777 000
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	0
1.1.5 Lainnya	0
1.2 Belanja Bunga	0
1.3 Belanja Subsidi	1 013 325 000
1.4 Belanja Hibah	2 313 709 000
1.5 Belanja Bantuan Sosial	8 617 407 000
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4 301 665 000
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2 986 819 000
1.8 Belanja Tidak Terduga	2 114 814 000
2. Belanja Langsung	117 833 503 000
2.1 Belanja Pegawai	0
2.2 Belanja Barang dan Jasa	63 209 950 000
2.3 Belanja Modal	54 623 553 000
B. Pembiayaan Daerah	36 815 916 000
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	33 160 394 000
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3 655 522 000
Jumlah Pengeluaran Daerah	344 929 451 000

Tabel 3.1.16
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang Menurut Komponen Pengeluaran, 2010
(Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai
A. Belanja Daerah	320 274 956 000
1. Belanja Tidak Langsung	156 680 239 000
1.1 Belanja Pegawai	132 617 172 000
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	100 448 974 000
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	31 300 365 000
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	814 820 000
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	53 013 000
1.1.5 Lainnya	0
1.2 Belanja Bunga	0
1.3 Belanja Subsidi	0
1.4 Belanja Hibah	13 456 559 000
1.5 Belanja Bantuan Sosial	9 420 408 000
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 186 100 000
1.8 Belanja Tidak Terduga	0
2. Belanja Langsung	163 594 717 000
2.1 Belanja Pegawai	22 338 658 000
2.2 Belanja Barang dan Jasa	60 824 711 000
2.3 Belanja Modal	80 431 348 000
B. Pembiayaan Daerah	38 509 443 000
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	35 009 443 000
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3 500 000 000
Jumlah Pengeluaran Daerah	358 784 399 000

Tabel 3.1.17
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kota Bukittinggi Menurut Komponen Pengeluaran, 2010
(Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai
A. Belanja Daerah	363 236 193 806
1. Belanja Tidak Langsung	232 783 921 527
1.1 Belanja Pegawai	209 549 305 264
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	148 340 811 683
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	60 176 956 874
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	855 000 000
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	176 536 707
1.1.5 Lainnya	0
1.2 Belanja Bunga	0
1.3 Belanja Subsidi	0
1.4 Belanja Hibah	8 897 878 673
1.5 Belanja Bantuan Sosial	13 328 869 690
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0
1.8 Belanja Tidak Terduga	1 007 867 900
2. Belanja Langsung	130 452 272 279
2.1 Belanja Pegawai	29 824 976 178
2.2 Belanja Barang dan Jasa	52 709 480 286
2.3 Belanja Modal	47 917 815 815
B. Pembiayaan Daerah	65 643 577 219
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	65 623 577 219
2. Pembayaran Pokok Utang	20 000 000
Jumlah Pengeluaran Daerah	428 879 771 025

Tabel 3.1.18
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kota Payakumbuh Menurut Komponen Pengeluaran, 2010
(Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai
A. Belanja Daerah	356 247 338 623
1. Belanja Tidak Langsung	191 748 760 393
1.1 Belanja Pegawai	164 072 080 853
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	140 818 899 876
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	21 902 916 795
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1 019 360 000
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	330 904 182
1.1.5 Lainnya	0
1.2 Belanja Bunga	5 254 653
1.3 Belanja Subsidi	0
1.4 Belanja Hibah	22 106 503 120
1.5 Belanja Bantuan Sosial	4 655 925 267
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	730 000 000
1.8 Belanja Tidak Terduga	178 996 500
2. Belanja Langsung	164 498 578 230
2.1 Belanja Pegawai	33 517 289 738
2.2 Belanja Barang dan Jasa	69 249 160 039
2.3 Belanja Modal	61 732 128 453
B. Pembiayaan Daerah	55 522 259 249
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	53 401 437 386
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 921 597 713
3. Pembayaran Pokok Utang	199 224 150
Jumlah Pengeluaran Daerah	411 769 597 872

Tabel 3.1.19
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kota Pariaman Menurut Komponen Pengeluaran, 2010
(Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Nilai
A. Belanja Daerah	340 989 686 917
1. Belanja Tidak Langsung	182 823 640 724
1.1 Belanja Pegawai	157 807 594 884
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	117 784 243 051
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	20 322 758 418
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	654 000 000
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	326 910 215
1.1.5 Lainnya	18 719 683 200
1.2 Belanja Bunga	0
1.3 Belanja Subsidi	72 000 000
1.4 Belanja Hibah	4 850 369 500
1.5 Belanja Bantuan Sosial	4 937 345 100
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7 424 009 840
1.8 Belanja Tidak Terduga	7 732 321 400
2. Belanja Langsung	158 166 046 193
2.1 Belanja Pegawai	12 515 478 197
2.2 Belanja Barang dan Jasa	60 766 231 730
2.3 Belanja Modal	84 884 336 266
B. Pembiayaan Daerah	121 647 625 125
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	119 581 454 461
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	742 000 000
3. Pembayaran Pokok Utang	1 324 170 664
Jumlah Pengeluaran Daerah	462 637 312 042

Tabel 4
Realisasi Belanja Daerah
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten :</u>	
1. Kepulauan Mentawai	458 396 222 433
2. Pesisir Selatan	725 141 398 000
3. Solok	537 104 294 497
4. Sijunjung	494 231 196 770
5. Tanah Datar	568 631 590 000
6. Padang Pariaman	710 430 206 244
7. Agam	594 603 515 017
8. Lima Puluh Kota	551 919 311 773
9. Pasaman	439 038 321 696
10. Solok Selatan	319 351 847 911
11. Dharmasraya	453 188 540 605
12. Pasaman Barat	490 644 367 648
<u>Kota :</u>	
13. Padang	1 100 368 159 520
14. Solok	317 287 566 518
15. Sawahlunto	308 113 535 000
16. Padang Panjang	320 274 956 000
17. Bukittinggi	363 236 193 806
18. Payakumbuh	356 247 338 623
19. Pariaman	340 989 686 917
Sumatera Barat	2 239 753 491 320

Tabel 4.1
Realisasi Belanja Tidak Langsung
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten :</u>	
1. Kepulauan Mentawai	206 086 174 274
2. Pesisir Selatan	499 150 074 000
3. Solok	410 278 372 755
4. Sijunjung	277 951 360 631
5. Tanah Datar	456 151 012 000
6. Padang Pariaman	541 193 296 321
7. Agam	471 173 692 058
8. Lima Puluh Kota	415 313 373 852
9. Pasaman	317 562 679 125
10. Solok Selatan	181 120 285 805
11. Dharmasraya	247 210 353 093
12. Pasaman Barat	282 218 107 025
<u>Kota :</u>	
13. Padang	803 197 038 410
14. Solok	175 733 716 907
15. Sawahlunto	190 280 032 000
16. Padang Panjang	156 680 239 000
17. Bukittinggi	232 783 921 527
18. Payakumbuh	191 748 760 393
19. Pariaman	182 823 640 724
Sumatera Barat	1 031 743 731 585

Tabel 4.1.1
Realisasi Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten :</u>	
1. Kepulauan Mentawai	127 950 513 274
2. Pesisir Selatan	416 161 742 000
3. Solok	364 746 778 609
4. Sijunjung	225 476 199 884
5. Tanah Datar	404 385 774 000
6. Padang Pariaman	424 696 885 291
7. Agam	416 512 671 497
8. Lima Puluh Kota	375 580 543 667
9. Pasaman	278 467 623 630
10. Solok Selatan	153 234 042 737
11. Dharmasraya	211 755 478 214
12. Pasaman Barat	255 849 934 424
<u>Kota :</u>	
13. Padang	720 736 966 580
14. Solok	144 515 466 789
15. Sawahlunto	168 932 293 000
16. Padang Panjang	132 617 172 000
17. Bukittinggi	209 549 305 264
18. Payakumbuh	164 072 080 853
19. Pariaman	157 807 594 884
Sumatera Barat	452 838 727 813

Tabel 4.1.2
Realisasi Belanja Bunga
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten :</u>	
1. Kepulauan Mentawai	0
2. Pesisir Selatan	0
3. Solok	0
4. Sijunjung	0
5. Tanah Datar	0
6. Padang Pariaman	0
7. Agam	0
8. Lima Puluh Kota	0
9. Pasaman	0
10. Solok Selatan	0
11. Dharmasraya	0
12. Pasaman Barat	0
<u>Kota :</u>	
13. Padang	0
14. Solok	0
15. Sawahlunto	0
16. Padang Panjang	0
17. Bukittinggi	0
18. Payakumbuh	5 254 653
19. Pariaman	0
Sumatera Barat	0

Tabel 4.1.3
Realisasi Belanja Subsidi
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten :</u>	
1. Kepulauan Mentawai	0
2. Pesisir Selatan	0
3. S o l o k	0
4. Sijunjung	1 486 399 600
5. Tanah Datar	0
6. Padang Pariaman	0
7. A g a m	0
8. Lima Puluh Kota	0
9. Pasaman	0
10. Solok Selatan	0
11. Dharmasraya	0
12. Pasaman Barat	0
<u>Kota :</u>	
13. Padang	0
14. S o l o k	0
15. Sawahlunto	1 013 325 000
16. Padang Panjang	0
17. Bukittinggi	0
18. Payakumbuh	0
19. Pariaman	72 000 000
Sumatera Barat	0

Tabel 4.1.4
Realisasi Belanja Hibah
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten :</u>	
1. Kepulauan Mentawai	15 495 000 000
2. Pesisir Selatan	11 392 448 000
3. S o l o k	20 302 783 760
4. Sijunjung	21 843 567 878
5. Tanah Datar	16 350 580 000
6. Padang Pariaman	17 544 674 026
7. A g a m	19 297 269 031
8. Lima Puluh Kota	22 959 910 329
9. Pasaman	20 401 495 846
10. Solok Selatan	16 532 780 200
11. Dharmasraya	19 502 215 696
12. Pasaman Barat	15 154 794 095
<u>Kota :</u>	
13. Padang	24 862 169 050
14. S o l o k	20 116 515 433
15. Sawahlunto	2 313 709 000
16. Padang Panjang	13 456 559 000
17. Bukittinggi	8 897 878 673
18. Payakumbuh	22 106 503 120
19. Pariaman	4 850 369 500
Sumatera Barat	56 700 222 061

Tabel 4.1.5
Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten :</u>	
1. Kepulauan Mentawai	56 340 661 000
2. Pesisir Selatan	4 942 251 000
3. S o l o k	5 756 048 674
4. Sijunjung	8 321 967 486
5. Tanah Datar	16 994 319 000
6. Padang Pariaman	87 614 272 143
7. A g a m	11 718 516 401
8. Lima Puluh Kota	1 604 350 000
9. Pasaman	4 904 994 000
10. Solok Selatan	1 385 088 600
11. Dharmasraya	2 815 433 183
12. Pasaman Barat	3 437 876 530
<u>Kota :</u>	
13. Padang	13 168 399 800
14. S o l o k	3 303 859 685
15. Sawahlunto	8 617 407 000
16. Padang Panjang	9 420 408 000
17. Bukittinggi	13 328 869 690
18. Payakumbuh	4 655 925 267
19. Pariaman	4 937 345 100
Sumatera Barat	55 567 603 553

Tabel 4.1.6
Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota
dan Pemerintah Desa Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten :</u>	
1. Kepulauan Mentawai	0
2. Pesisir Selatan	284 030 000
3. S o l o k	1 007 470 481
4. Sijunjung	360 584 241
5. Tanah Datar	671 090 000
6. Padang Pariaman	658 655 913
7. A g a m	0
8. Lima Puluh Kota	0
9. Pasaman	257 879 199
10. Solok Selatan	0
11. Dharmasraya	0
12. Pasaman Barat	284 009 807
<u>Kota :</u>	
13. Padang	0
14. S o l o k	0
15. Sawahlunto	4 301 665 000
16. Padang Panjang	0
17. Bukittinggi	0
18. Payakumbuh	0
19. Pariaman	0
Sumatera Barat	290 666 129 173

Tabel 4.1.7
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota
dan Pemerintah Desa Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten :</u>	
1. Kepulauan Mentawai	4 300 000 000
2. Pesisir Selatan	65 332 898 000
3. S o l o k	17 843 141 231
4. Sijunjung	15 733 129 642
5. Tanah Datar	16 334 250 000
6. Padang Pariaman	9 768 099 323
7. A g a m	22 472 359 629
8. Lima Puluh Kota	13 652 410 856
9. Pasaman	9 590 180 450
10. Solok Selatan	9 035 687 468
11. Dharmasraya	12 863 226 000
12. Pasaman Barat	5 691 492 169
<u>Kota :</u>	
13. Padang	39 188 412 180
14. S o l o k	0
15. Sawahlunto	2 986 819 000
16. Padang Panjang	1 186 100 000
17. Bukittinggi	0
18. Payakumbuh	730 000 000
19. Pariaman	7 424 009 840
Sumatera Barat	172 924 980 350

Tabel 4.1.8
Realisasi Belanja Tidak Terduga
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten :</u>	
1. Kepulauan Mentawai	2 000 000 000
2. Pesisir Selatan	1 036 705 000
3. S o l o k	622 150 000
4. Sijunjung	4 729 511 900
5. Tanah Datar	1 414 999 000
6. Padang Pariaman	910 709 625
7. A g a m	1 172 875 500
8. Lima Puluh Kota	1 516 159 000
9. Pasaman	3 940 506 000
10. Solok Selatan	932 686 800
11. Dharmasraya	274 000 000
12. Pasaman Barat	1 800 000 000
<u>Kota :</u>	
13. Padang	5 241 090 800
14. S o l o k	7 797 875 000
15. Sawahlunto	2 114 814 000
16. Padang Panjang	0
17. Bukittinggi	1 007 867 900
18. Payakumbuh	178 996 500
19. Pariaman	7 732 321 400
Sumatera Barat	3 046 068 635

Tabel 4.2
Realisasi Belanja Langsung
Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2010 (Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten :</u>	
1. Kepulauan Mentawai	252 310 048 159
2. Pesisir Selatan	225 991 324 000
3. S o l o k	126 825 921 742
4. Sijunjung	216 279 836 139
5. Tanah Datar	112 480 578 000
6. Padang Pariaman	169 236 909 923
7. A g a m	123 429 822 959
8. Lima Puluh Kota	136 605 937 921
9. Pasaman	121 475 642 571
10. Solok Selatan	138 231 562 106
11. Dharmasraya	205 978 187 512
12. Pasaman Barat	208 426 260 623
<u>Kota :</u>	
13. Padang	297 171 121 110
14. S o l o k	141 553 849 611
15. Sawahlunto	117 833 503 000
16. Padang Panjang	163 594 717 000
17. Bukittinggi	130 452 272 279
18. Payakumbuh	164 498 578 230
19. Pariaman	158 166 046 193
Sumatera Barat	1 208 009 759 735

Tabel 4.2.1
Realisasi Belanja Langsung Belanja Pegawai
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten :</u>	
1. Kepulauan Mentawai	33 145 690 400
2. Pesisir Selatan	8 655 219 000
3. S o l o k	3 745 946 790
4. Sijunjung	20 422 999 667
5. Tanah Datar	22 820 396 000
6. Padang Pariaman	10 651 605 500
7. A g a m	16 806 266 459
8. Lima Puluh Kota	19 193 565 244
9. Pasaman	9 537 597 950
10. Solok Selatan	12 598 697 590
11. Dharmasraya	22 655 617 696
12. Pasaman Barat	22 896 257 095
<u>Kota :</u>	
13. Padang	32 264 497 360
14. S o l o k	19 344 658 500
15. Sawahlunto	0
16. Padang Panjang	22 338 658 000
17. Bukittinggi	29 824 976 178
18. Payakumbuh	33 517 289 738
19. Pariaman	12 515 478 197
Sumatera Barat	79 094 896 118

Tabel 4.2.2
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten :</u>	
1. Kepulauan Mentawai	118 344 469 738
2. Pesisir Selatan	90 411 499 000
3. S o l o k	67 681 537 957
4. Sijunjung	64 612 905 550
5. Tanah Datar	53 234 566 000
6. Padang Pariaman	73 164 238 042
7. A g a m	62 165 495 105
8. Lima Puluh Kota	44 034 396 985
9. Pasaman	70 876 919 757
10. Solok Selatan	49 994 271 774
11. Dharmasraya	71 126 957 561
12. Pasaman Barat	84 389 084 379
<u>Kota :</u>	
13. Padang	130 670 689 750
14. S o l o k	72 221 285 674
15. Sawahlunto	63 209 950 000
16. Padang Panjang	60 824 711 000
17. Bukittinggi	52 709 480 286
18. Payakumbuh	69 249 160 039
19. Pariaman	60 766 231 730
Sumatera Barat	545 847 299 548

Tabel 4.2.3
Realisasi Belanja Modal
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten :</u>	
1. Kepulauan Mentawai	100 819 888 021
2. Pesisir Selatan	126 924 606 000
3. S o l o k	55 398 436 995
4. Sijunjung	131 243 930 922
5. Tanah Datar	36 425 616 000
6. Padang Pariaman	85 421 066 381
7. A g a m	44 458 061 395
8. Lima Puluh Kota	73 377 975 692
9. Pasaman	41 061 124 864
10. Solok Selatan	75 638 592 742
11. Dharmasraya	112 195 612 255
12. Pasaman Barat	101 140 919 149
<u>Kota :</u>	
13. Padang	134 235 934 000
14. S o l o k	49 987 905 437
15. Sawahlunto	54 623 553 000
16. Padang Panjang	80 431 348 000
17. Bukittinggi	47 917 815 815
18. Payakumbuh	61 732 128 453
19. Pariaman	84 884 336 266
Sumatera Barat	583 067 564 069

Tabel 4.3
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Menurut Kabupaten/Kota, 2010
(Rupiah)

Kabupaten/Kota	Nilai
<u>Kabupaten :</u>	
1. Kepulauan Mentawai	226 129 479 733
2. Pesisir Selatan	55 384 784 000
3. S o l o k	50 101 499 881
4. Sijunjung	64 156 087 346
5. Tanah Datar	63 226 593 000
6. Padang Pariaman	51 698 158 169
7. A g a m	61 143 521 720
8. Lima Puluh Kota	47 088 648 075
9. Pasaman	44 003 612 590
10. Solok Selatan	53 002 833 797
11. Dharmasraya	21 910 155 043
12. Pasaman Barat	49 587 880 673
<u>Kota :</u>	
13. Padang	46 999 871 360
14. S o l o k	104 913 262 952
15. Sawahlunto	36 815 916 000
16. Padang Panjang	38 509 443 000
17. Bukittinggi	65 643 577 219
18. Payakumbuh	55 522 259 249
19. Pariaman	121 647 625 125
Sumatera Barat	355 105 212 133

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sumbar.bps.go.id>



**Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Barat**

Jl Khatib Sulaiman No.48 Padang 25135
Telp. (0751)442158,442159, Fax.(0751)442161
Homepage : <http://sumbar.bps.go.id>
Email : sumbar@bps.go.id



2 0 1 2 . 7 2 0 3 0 5 . 1 3